

Pancasila sebagai dasar pembentukan identitas nasional: Kontribusi dalam membentuk kewarganegaraan yang beretika

Almeiza Kanaya Asghaf

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: kanayaalmeiza@gmail.com

Kata Kunci:

Kewarganegaraan, etika,
kontribusi, pendidikan,
moral

Keywords:

Citizenship, ethics,
contribution, education,
morals

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi berbagai pihak dalam membentuk kewarganegaraan yang beretika, dengan fokus pada peran individu, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai etika kepada warga negara, menggunakan Pancasila sebagai dasar pembentukan identitas nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi kolektif melalui pendidikan etika, keteladanan, pelatihan kepemimpinan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dapat menghasilkan warga negara yang bertanggung jawab, toleran, jujur, dan mencintai tanah air. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkembang secara moral dan

etika, baik di perkotaan maupun pedesaan. Peran ini harus diwujudkan melalui sinergi yang berkelanjutan antara keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama, sekolah sebagai wahana pembelajaran formal, dan masyarakat sebagai ruang aktualisasi nilai. Ketika semua elemen ini bekerja secara harmonis, maka pembentukan karakter kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada kemajuan teknologi dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan moralitas dan integritas setiap warganya.

ABSTRACT

This study aims to analyze the contributions of various parties in shaping ethical citizenship, focusing on the roles of individuals, educational institutions, families, and society in instilling ethical values in citizens, using Pancasila as the foundation for national identity formation. The research findings show that collective contributions through ethical education, role modeling, leadership training, and active participation in social activities can produce responsible, tolerant, honest, and patriotic citizens. Therefore, society plays a crucial role in creating a generation that is not only intelligent but also morally and ethically mature, both in urban areas and rural communities. This role must be realized through ongoing synergy between the family as the first educational environment, schools as a formal learning medium, and society as a space for actualizing values. When all these elements work harmoniously, the formation of citizenship character in accordance with Pancasila values can be achieved optimally. Thus, national development does not only rely on technological and economic progress, but also on strengthening the morality and integrity of each citizen.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pancasila pada dasarnya merupakan kumpulan nilai yang termuat dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Dari sudut pandang filsafat, nilai merujuk pada konsep abstrak yang mencerminkan kebaikan dan penghargaan. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan dasar filosofis dan prinsip-prinsip mendasar. Nilai-nilai inti yang terkandung dalam Pancasila adalah: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) persatuan Indonesia, (4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar ini bersifat abstrak dan normatif, sehingga belum bisa diterapkan secara langsung tanpa penjabaran ke dalam norma atau nilai yang lebih konkret.

Sebagai nilai dasar, Pancasila menjadi sumber bagi penyusunan norma-norma kehidupan bernegara di Indonesia. Berdasarkan kelima prinsip tersebut, norma-norma bernegara dapat dirumuskan dan diterapkan, baik berupa norma etik maupun norma hukum negara. Etika kehidupan berbangsa merupakan suatu rumusan yang berlandaskan pada ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Pancasila menjadi pedoman utama dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bernegara. Ketetapan mengenai etika kehidupan berbangsa ini juga dapat diartikan sebagai norma moral yang merinci nilai-nilai etik yang terkandung dalam Pancasila.

Identitas nasional memiliki peran sentral dalam memperkuat posisi bangsa di tengah persaingan geopolitik dan perubahan konstelasi global (Faslah, 2024). Karakter bangsa tidak hanya terbentuk dari karakter individu, tetapi juga harus mencerminkan rasa kebangsaan yang kuat dalam kerangka keberagaman budaya. Karakter bangsa berfungsi sebagai perekat budaya yang diwujudkan melalui kesadaran dan kecerdasan budaya seluruh warga negara. Di era globalisasi, penguatan identitas nasional di kalangan generasi muda harus dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai panduan sikap dan perilaku (Atina Al 'Ulya et al., 2024). Dalam kebijakan nasional Pembangunan karakter bangsa, dijelaskan bahwa karakter bangsa merupakan kualitas perilaku kolektif yang baik dan khas, yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, sikap, cita-cita, serta perilaku berbangsa dan bernegara, yang muncul dari pemikiran, perasaan, dan semangat individu maupun kelompok.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan melemahnya nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu sarana penting dalam memperkuat identitas nasional. (Sofha et al., 2023) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berwawasan kebangsaan, berakhlak mulia, dan berjiwa demokratis.

Tujuan dari etika kehidupan berbangsa adalah: (1) untuk menyediakan dasar etik dan moral bagi seluruh elemen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan di berbagai bidang; (2) untuk menetapkan prinsip-prinsip utama etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat; serta (3) sebagai pedoman untuk menilai penerapan nilai-nilai etik dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika kehidupan berbangsa mencakup hal-hal berikut:

1. Etika Sosial dan Budaya

Etika ini berakar pada rasa kemanusiaan yang mendalam, yang menekankan pentingnya sikap jujur, saling peduli, saling memahami, menghargai, mencintai, dan membantu antar sesama manusia serta sesama warga bangsa. (Dewi & Ulfiah, 2021) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam membentuk karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai kebangsaan, moral, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Melalui pembelajaran yang kontekstual dan berbasis pengalaman, peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pendidikan kewarganegaraan tidak berhenti pada aspek kognitif semata.

Modernisasi sering dipandang sebagai perubahan dalam gaya hidup masyarakat dan kemajuan teknologi. Namun, ada pernyataan yang menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi dasar negara yang tidak terpengaruh oleh waktu. Namun, apakah ini hanya sebuah metafora? Apakah pergeseran generasi dan cara berkomunikasi bisa mengancam nilai-nilai Pancasila? Perubahan dalam masyarakat jelas terlihat, terutama dalam hal gaya hidup dan pola pikir, di mana sikap egois dan pragmatis semakin dominan. Selain itu, kehidupan modern menunjukkan tren ke arah masyarakat yang lebih individualistis, konsumtif, dan materialistis, dengan nilai-nilai gotong royong yang semakin memudar, dan sikap duniawi yang semakin kuat. (12251, n.d.).

Penting untuk menghidupkan kembali budaya malu terhadap kesalahan yang bertentangan dengan moral agama dan budaya bangsa. Selain itu, budaya ketauladanan harus dicontohkan oleh pemimpin di semua lapisan masyarakat, untuk membangkitkan kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi, menghargai budaya nasional, dan beradaptasi dengan tuntutan globalisasi.

2. Etika Pemerintahan dan Politik

Etika ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif, serta atmosfer politik yang demokratis dengan keterbukaan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perbedaan. Pejabat publik harus empati, siap mundur jika melanggar prinsip, dan berperilaku jujur serta rendah hati.

3. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ini mendorong persaingan yang adil, pengembangan etos kerja, dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil melalui kebijakan berkelanjutan.

4. Etika Penegakan Hukum

Etika ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum untuk mencapai ketertiban sosial, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

5. Etika Keilmuan

Etika keilmuan mengutamakan nilai kemanusiaan dan ilmu pengetahuan untuk menjaga martabat dan kebenaran, serta mendorong kreativitas dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Dasim Budimansyah (dalam Sulistyarini, 2015: 6), pendidikan kewarganegaraan dapat dipahami sebagai kontribusi pendidikan dalam membentuk karakteristik yang mencirikan seorang warga negara. Etika keilmuan menekankan pentingnya etos kerja yang kuat, dengan menghargai waktu, disiplin dalam berpikir dan bertindak, serta memegang teguh janji dan komitmen untuk mencapai hasil terbaik. Selain itu, etika ini mendorong kemampuan untuk menghadapi rintangan dan tantangan, serta mengubahnya menjadi peluang. Etika ini juga mendorong inovasi untuk menciptakan peluang baru, membangun ketahanan, dan semangat tidak mudah menyerah.

Pembahasan

Pancasila, sebagai landasan etika, akhirnya diimplementasikan dalam norma-norma etik atau moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai salah satu sumber norma etik negara, bersama dengan nilai-nilai agama. Seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR RI No VI/MPR/2001, etika kehidupan berbangsa berasal dari ajaran agama, terutama yang bersifat universal, serta nilai-nilai budaya luhur bangsa yang tercermin dalam Pancasila, yang menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bernegara. Hal ini sejalan dengan kenyataan di Indonesia, yang tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," yang menunjukkan komitmen kuat masyarakat Indonesia untuk mewujudkan bangsa dan negara yang bersatu. Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila agar mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter dan berjiwa kebangsaan (Kurnia, 2023).

Pembelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat dasar perlu dirancang secara kreatif dan aplikatif agar siswa dapat memahami serta mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari (Retnasari et al., 2023). Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis pengalaman, permainan edukatif, dan integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Dengan metode tersebut, siswa tidak hanya menghafal konsep, tetapi juga mampu membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti toleransi, tanggung jawab, dan cinta tanah air sejak usia dini. Hal tersebut juga didukung penelitian oleh (HARIYANTO, 2021), yang menyampaikan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, memiliki rasa nasionalisme, serta mampu menghadapi tantangan zaman secara bertanggung jawab.

Ini berkaitan langsung dengan konsep kenegaraan, yang mencerminkan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang mendorong bangsa Indonesia untuk berusaha mencapai kesetaraan dan keharmonisan. Pemahaman ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme, yang menekankan pada penghargaan, toleransi, kerjasama, persatuan, dan solidaritas antar berbagai kelompok etnis. (1988, n.d.).

Etika

Kata "etika" berasal dari bahasa Yunani "ethos," yang secara harfiah berarti kebiasaan, karakter, atau perilaku manusia. Etika dapat diartikan sebagai sistem nilai, yang mencakup norma-norma moral yang menjadi pedoman hidup untuk menilai apakah perilaku seseorang itu baik atau buruk, baik dalam konteks individu maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain etika, ada juga istilah "etiket," yang berasal dari bahasa Prancis, yang berkaitan dengan pengaturan perilaku manusia. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa etika berhubungan dengan moralitas, sementara etiket lebih berfokus pada sopan santun.

Lebih lanjut, perbedaan antara etika dan etiket dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) etika mengatur bagaimana suatu tindakan seharusnya dilakukan oleh manusia, sedangkan etiket lebih fokus pada cara pelaksanaan suatu tindakan dalam konteks sosial; (2) etiket hanya berlaku dalam interaksi sosial, sementara etika tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain; (3) etiket bersifat relatif, sedangkan etika bersifat absolut dan tidak berubah; (4) etiket lebih menekankan pada aspek lahiriah manusia, sedangkan etika berhubungan dengan aspek batin atau moral seseorang.

Kesimpulan dan Saran

Di kota-kota besar, seringkali masyarakat kurang menyadari pentingnya peran mereka dalam lingkungan sekitar. Nilai-nilai moral, etika, dan religiositas seringkali hilang pada individu yang merasa selalu benar. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya peningkatan kesadaran terhadap identitas nasional dengan menegakkan nilai-nilai Pancasila. Revitalisasi Pancasila sebagai cerminan identitas nasional harus berfokus pada pembinaan moral. Pancasila harus kembali menjadi ideologi bangsa yang berfungsi sebagai pedoman hidup dan cita-cita bersama. Dengan pendekatan ini, identitas nasional dapat lebih dipahami oleh masyarakat sebagai penerus tradisi, sehingga pemberdayaan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan bermakna seiring dengan perkembangan zaman. Melalui revitalisasi Pancasila dalam pemberdayaan identitas nasional, identitas ini tak hanya dilihat dari teks, tetapi juga dalam konteks sosial yang bisa menjadi dasar kritik terhadap penyimpangan yang ada di masyarakat. (Buku Identitas Nasional, n.d.).

Penerapan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan persatuan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan, penggunaan bahasa, pelestarian budaya, sikap toleransi, dan partisipasi aktif, identitas nasional dapat ditegakkan dan diperkuat. Selain itu, kesadaran terhadap lingkungan juga harus menjadi bagian integral dari identitas nasional. Masyarakat perlu menyadari bahwa keberagaman adalah kekuatan yang sangat berharga, dan dengan mengimplementasikan nilai-nilai identitas nasional, kita bisa mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan identitas bangsa agar tetap relevan dan kuat di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, identitas nasional bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga inti yang menyatukan setiap individu dalam kesatuan bangsa yang besar.

Pendidikan memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses, kualitas yang masih rendah, dan kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila harus terus berlangsung, dikembangkan, dan dijaga kelestariannya, karena karakter bangsa Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pandangan hidupnya.

Daftar Pustaka

- Atina Al 'Ulya, Nurmadjidah Maradjabessy, & Audyah Damayanti. (2024). Milenial dan kewarganegaraan. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(6). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/6439>
- Dewi, D. A., & Ulfiah, Z. (2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 499–506.
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- HARIYANTO, H. (2021). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 95–100.
- Kurnia, H. (2023). Upaya meningkatkan pendidikan indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 472–478.
- Retnasari, L., Hidayah, Y., Mulyoto, G. P., & Istianah, A. (2023). Pancasila and Citizenship Education Learning Model for Elementary School Students: A Literature Review. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 16(1), 44–51. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/madrasah/index>
- Sofha, G. F., Nabila, I., Yusriyyah, M. Z., & Annisa, N. (2023). Peran pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan karakter bangsa. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 408–420.